

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT.Indeks.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan Di Daerah Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Pasrah, Rudi. 2007. *Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan*. *Kajian Ekonomi* 6 (2) 198-221.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?.* SNA X Makassar.

- Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 5 (1), April: 28-50.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*. SNA XII.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyuni, Sri. 2008. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Wulandari, Anita. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. JKAP 5 (2), November: 17-33.
- Yuwono, Sony, Dwi Cahyo Utomo, H. Suheiry Zein, dan H. Azrafiany A.R. 2008. *Memahami APBD dan Pemasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Bayumedia Publishing.